

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)



**OLEH
RIRIN VIVI ADRINI.A
B111 13 558**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)

OLEH

RIRIN VIVI ADRINI.A

B 111 13 558

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum

Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)

disusun dan diajukan oleh

RIRIN VIVI ADRINI.A
B 111 13 558

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 16 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ririn Vivi Adrini.A

Nomor Pokok : B11113558

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pendahan (Studi Kasus Putusan Nomor
1673/Pid.B/2015/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

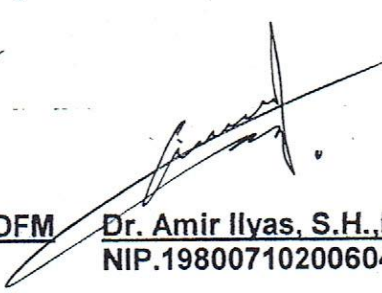
Makassar, Mei 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

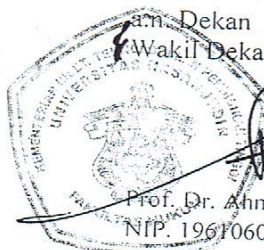
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RIRIN VIVI ADRINI A
Nomor Pokok	: B11113558
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH
NIP. 196106071986011003

ABSTRAK

RIRIN VIVI ADRINI.A, (B11113558) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan No. 1673/Pid.B/2015/PN.Mks), di bawah bimbingan Slamet Sampurno Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan : 1673/Pid.B/2015/PN.Mks

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan hal ini Hakim yang menangani perkara ini. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, adalah : 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 1673/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks, berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks yaitu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh karena tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jerat hukum maka hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

Kata Pengantar



Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)”** merupakan salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk sumber hukum, data, saran, kritikan, semangat dan juga doa. Kemudian melalui kesempatan ini, dengan rasa hormat Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda tercinta Irfandi dan ibunda tercinta Nurlina, yang senantiasa mendoakan segala kebaikan, mendidik Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan dorongan semangat pantang menyerah demi kesuksesan Penulis selama

menyelesaikan studi, serta keluarga besar Penulis yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, semangat, dan mendoakan yang terbaik untuk Penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan pengarahan, saran dan kritikan yang membangun dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. bapak, H.M. Imran Arief, S.H., M.S., dan ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staff, serta segenap

Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan melayani urusan administrasi.

6. Bapak Cening Budiana, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, beserta staf Pegawai pada Pengadilan Negeri Makassar.
7. Sahabat seperjuangan yang paling perhatian, Fatmawati Parenrengi, Risma Nur Hijriah, Andi Adwiyah Fiscarina, Herwindah Annisa, Dian Eka Putri, Fajriah Rezeki, Athira Maulidina dan Nidaul Hasanah, terima kasih atas dukungan, doa, semangat, tawa, keceriaan, serta perjuangan bersama melewati masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga S.H segera tercantum di belakang nama kita semua dan semoga kita semua sukses kedepannya.
8. Terkhusus untuk geng Mcd, ratu, risma, wiwied yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
9. Sahabat Sejak dari SMP, Chika Pratiwi dan Nurva Atun Sholeha yang sedari dulu selalu berada disamping dan dihati Penulis, terima kasih atas segala momen yang kita lewati, semangat yang kalian berikan, kasih sayang, dan dukungan kepada Penulis.
10. Seluruh rekan-rekan KKN Tematik Kamtibmas Gel.94 Kerjasama Unhas – Polda Komp. Unhas Antang, terima kasih untuk

kebersamaannya melewati hari-hari selama KKN.

11. Seluruh saudara (i) Angkatan ASAS 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga sukses selalu mengiringi langkah kita.

12. Serta seluruh pihak yang turut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi Penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Yuridis	8
B. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	10
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Tindak Pidana Penadahan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	21
D. Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana	23

2. Jenis-jenis Pemidanaan	24
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	35
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Peranan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN/Mks)	49
1. Identitas Terdakwa	50
2. Posisi Kasus.....	50
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	52
4. Barang Bukti Tindak Pidana Penadahan.....	53
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	53
6. Amar Putusan.....	54
7. Komentar Penulis.	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)	58
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	58

2. Amar Putusan.....	66
3. Komentar Penulis	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya

ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Oleh karna itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda, dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4): “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”

Saat ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:¹

“Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.”

Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut

¹R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 314.

dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajiban, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.

Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat banyak penelitian tentang tindak pidana penadahan, baik itu tindak pidana penadahan sepeda motor, mobil, dan alat-alat elektronik, tetapi masih jarang penulis temukan penelitian tentang tindak pidana penadahan baju seragam sekolah.

Seperti pada kasus perkara Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks merupakan kasus penadahan pasal 480 KUHP. Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Rosmini binti Dg. Asis alias Mini, telah memenuhi unsur tindak pidana penadahan dalam pasal 480 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa kemudian dijatuhi keputusan berupa penjara selama 4 (empat) bulan, menarik untuk diamati bagaimana penerapan hukum yang telah ditetapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis terdorong untuk mengangkat sebuah kajian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak pidana penadahan. Selain itu, juga sebagai wahana

informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang tindak pidana penadahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).² Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³

Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa. Kata tinjau mendapat akhiran-an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum oleh undang-undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum

² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

³ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya, hlm. 651.

pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan Pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.⁴ Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

⁴ Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70

- b. Moeljatno menggunakan istilah pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlaharangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- c. Tonggat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, ini didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah pandangan monitis, yakni suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan kedua adalah pandangan dualistik, pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh

KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian :⁵

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik

⁵ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48

beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (Pencurian), pasal 160 KUHPidana (Penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaiknya didalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang.

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...*drngan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata lain yang senada, seperti...diketahuinya dan sebagainya.

2) Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata...*karena* kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah...*karena kesalahannya*.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissions*.

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- 1) Delik *commissionis* tidak terlalu sulit untuk dipahami, misalnya berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.
- 2) Delik *omissionis* terdapat pada Pasal 522 KUHPidana (tidak datang menghadap ke pengadilan ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 KUHPidana (tidak melaporkan adanya pemufakatan kejahatan).

Disamping itu, ada yang disebut delik *commissionis permissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁶ Keharusan menyusui bayi terdapat didalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta

⁶*Ibid*, hlm 60

api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).⁷

e. Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Tindak Pidana Aduan Absolut, adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya
- 2) Tindak Pidana Aduan Relatif, pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
- 3) Tindak pidana bukan aduan, adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya

⁷ *Ibid*, hlm. 61

f. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :⁸

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan (4)). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- 4) Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- 5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- 6) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai lualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya yang disebutkan didalam pasal KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang⁹ mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

⁸Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S Publishing, Makassar,

hlm.67

⁹ P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123.

yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Moeljatno¹⁰ menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Vos¹¹ merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;

¹⁰ Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.69

¹¹ Adami Chazawi, *op.cit*, hal.72

- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sementara itu Leden Marpaung¹², juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (*schuld*).

- b. Unsur Objektif** Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas :

¹² Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 9.

- 1) Pebuatan manusia berupa:
 - a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
 - b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

C. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia¹³ disebutkan :

“Tadah : barang apa yang dipakai untuk menadah.”

“Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.”

¹³ Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 989

Pengertian yang diberikan dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu.

Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana

barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam Pasal 480 KUHP itu ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :

a. Unsur-Unsur Objektif :

1) Perbuatan Kelompok 1, yakni

- a) Membeli
- b) Menyewa
- c) Menukar
- d) Menerima gadai
- e) Menerima hadiah, atau

2) Perbuatan Kelompok 2 Untuk Menarik Keuntungan :

- a) Menjual;
- b) Menyewakan;
- c) Menukar;
- d) Menggadaikan;
- e) Mengangkut;
- f) Menyimpan;
- g) Menyembunyikan

3) Objeknya : suatu benda.

4) Sumbernya : Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

b. Unsur-Unsur Subjektif :

- 1) Yang diketahuinya, atau
- 2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Satochid Kartanegara,¹⁴ bahwa hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan* atau *penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana).

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hal. 275-276.

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):

- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu

tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa “ pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiska l”.

Dalam pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- a) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- b) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- c) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab

hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.

d) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal , pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu :

a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidan penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat

kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah, adalah :

- a) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d) Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b) putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat

menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

Mengenai pidana tutupan Adami Chazawi, menyatakan bahwa :

“Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah

terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.”

b. Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHPR. Soesilo (1981 : 47) hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.

- d) Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- e) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(curatele) atas anak sendiri ;
- f) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :

- a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
- b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurang nya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
- c) Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurang nya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

2) Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan

barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- a) Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan

sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

Mengenai pengumuman putusan hakim menyatakan bahwa maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori

relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*sosial defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.¹⁵

Berikut adalah pembagian teori-teori pemidanaan :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergelding theorieen*);

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁷ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁸ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁹

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :²⁰

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian Theory*);

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 24.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 90.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992, Hlm 12.

²⁰ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²¹

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²²

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan

²¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97.

masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁴

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :²⁵

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

²³ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

²⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 107.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa :²⁶

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan faktafakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya”.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:²⁷

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

²⁶ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 193-194

²⁷ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.91

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/*dictum* putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis

yang terungkap dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barangbarang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang

dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau *recidivis* atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP), dan faktor-faktor yang dapat meringankan pidana adalah terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi, baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat terhadap pengadilan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu :

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Instansi terkait. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat penyelesaian kasus Penadahan dengan nomor perkara Nomor. 1673/Pid.B/2015/PN.Mks yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder

1. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini

2. Data Skunder

Jenis data skunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan

masalah yang diteliti. Mencangkup buku-buku, putusan pengadilan (yurisprudensi) atau peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek-objek atau sumber data yang berkaitan dengan penelitian baik dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengenai kasus tersebut maupun mencari data berupa arsip atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber.

D. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*), seperti yang dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali

agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dll. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam deskripsi sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Rosmini binti Dg Asis alias Mini
Tempat Lahir : Bone
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 03 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pangkep Perumnas Sudiang Blok D
Kel.Sudiang Makassar Kec.Biringkanaya Kota
Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : ----

2. Posisi Kasus

Terdakwa Rosmini binti Dg. Asis als Mini pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di rumah terdakwa di Pangkep perumnas sudiang blok D Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyimpan, membeli, menukarkan, menjual atau menarik keuntungan sesuatu benda berupa 3 karung berisi pakaian seragam sekolah yang ketahu atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Dedy syam als Dedy bin Syamsuddin (terdakwa penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita menghubungi terdakwa untuk menitip barang berupa pakaian seragam sekolah sebanyak 3 karung. Setelah terdakwa menyetujui, terdakwa lalu keluar rumah menjemput orang yang mengantarkan barang tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanan barang di rumah terdakwa. Pada saat itu saksi Dedy Syam juga meminta terdakwa untuk membayar upah orang yang mengangkut barang sejumlah Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya terdakwa menelfon saksi Dedy Syam untuk menayakan penggantian uang milik terdakwa yang dipakai untuk membayar sewa angkut barang yang sebelumnya telah ditalangi oleh terdakwa, sehingga saksi Dedy Syam meminta terdakwa untuk menjual pakaian yang ada didalam karung sehingga uang bisa terbayarkan. Setelah terdakwa menjual secara eceran pakaian seragam sekolah tersebut, terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.500.000-, namun sisa hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi Dedy Syam. Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 saksi Dedy Syam mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil sisa barang yang ada dan pada saat itu saksi Dedy Syam memberi upah kepada tersangka berupa 3 ikat pakaian seragam atas permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali membeli barang berupa pakaian seragam sekolah dari Dedy Syam seharga Rp.500.00-, sebanyak 10 ikat.

Terdakwa juga menawarkan kepada Hasma untuk membeli 1 lembar rok pakaian seragam sekolah berwarna merah dengan harga Rp.10.000-, yang akhirnya disepakati untuk menukar 1 lembar rok tersebut dengan bensin sebanyak 1 liter. Karena harganya yang murah dan atas bujukan terdakwa sehingga saksi Hasma menyetujui untuk membeli pakaian seragam sekolah sebanyak 100 lembar dengan harga Rp.1.000.000-, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Dedy Syam untuk menyerahkan pakaian seragam sesuai pesanan saksi Hasma. Sisa pakaian seragam sekolah yang masih disimpan oleh terdakwa lalu dijual secara eceran dengan harga Rp.5.000,- per lembarnya. Sebelum menerima titipan saksi Dedy Syam berupa 3 karung yang berisi pakaian seragam sekolah untuk disimpan oleh terdakwa, saksi Dedy Syam memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang tersebut diambil dari tempat pengiriman barang dan tersangka sempat bertanya dengan kata "amanji" yang dijawab saksi "aman", terdakwa juga mengetahui kalau saksi Dedy Syam tidak memiliki pekerjaan tetap dan pernah menjalani pidana selama 2 tahun karena mengambil barang kiriman orang lain di perusahaan ekspedisi.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa Rosmini Binti Dg Asis Als Mini pada hari sabtu tanggal 29 agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2015 bertempat di rumah terdakwa di Pangkep, Perumnas Sudiang, Blok D, Kel, Sudiang, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah *menyimpan, membeli, menukarkan, menjual, atau menarik keuntungan sesuatu benda* berupa 3 karung berisi pakaian seragam sekolah, *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara berikut :*

- Bermula ketika saksi Dedy Syam Als Dedy Bin Syamsuddin (terdakwa penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita, menghubungi terdakwa untuk menitip barang berupa pakaian seragam sekolah sebanyak 3 karung. Setelah terdakwa menyetujui, terdakwa lalu keluar rumah menjemput orang yang mengantarkan barang tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanan barang di rumah terdakwa. Pada saat itu, saksi Dedy Syam juga meminta terdakwa untuk membayar upah orang yang mengangkut barang sejumlah Rp.200.000,-.
- Kemudian keesokan harinya, terdakwa menelpon saksi Dedy Syam untuk menanyakan penggantian uang milik terdakwa yang dipakai untuk membayar sewa angkutan barang yang sebelumnya telah ditalangi oleh terdakwa, sehingga saksi Dedy Syam meminta terdakwa untuk menjual pakaian yang ada di dalam karung sehingga uang terdakwa bisa terbayarkan. Setelah terdakwa menjual secara eceran pakaian seragam sekolah tersebut, terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.500.000,- namun sisah hasil penjualan tidak di serahkan kepada saksi Dedy Syam.
- Pada hari senin tanggal 31 Agustus tahun 2015, saksi Dedy Syam mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil sisa barang yang ada dan pada saat itu saksi Dedy Syam memberi upah kepada terdakwa berupa 3 ikat pakaian seragam atas permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali membeli

barang berupa pakaian seragam sekolah dari Dedy Syam seharga Rp.500.000,- sebanyak 10 ikat.

- Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Hasma untuk membeli 1 lembar rok pakaian seragam sekolah berwarna merah dengan harga Rp.10.000,- yang akhirnya disepakati untuk menukar 1 lembar rok tersebut dengan bensin sebanyak 1 liter. Karena harganya yang murah dan atas bujukan terdakwa sehingga saksi Hasma menyetujui untuk membeli pakaian seragam sekolah sebanyak 100 lembar dengan harga Rp.1.000.000,-, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Dedy untuk menyerahkan pakaian seragam sesuai pesanan saksi Hasma.
- Bahwa sisa pakaian seragam sekolah yang masih disimpan oleh terdakwa lalu dijual secara eceran dengan harga Rp.5.000,- per lembarnya.
- Bahwa sebelum menerima titipan saksi Dedy Syam berupa 3 karung yang berisi pakaian seragam sekolah untuk disimpan oleh terdakwa, saksi Dedy Syam memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang tersebut diambil dari tempat pengiriman barang dan tersangka sempat bertanya dengan kata “amanji?” yang dijawab saksi “aman”.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui kalau saksi Dedy Syam tidak memiliki pekerjaan tetap dan pernah menjalani pidana selama 2 tahun karena mengambil barang kiriman orang lain di perusahaan ekspedisi.

Perbuatan terdakwa Rosmini Binti Dg Asis Als Mini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

4. Barang Bukti Tindak Pidana Penadahan

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa :

1. 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam perkara An Dedy Syam.
2. 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna merah dipergunakan dalam perkara An. Dedy Syam.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Rosmini binti Dg. Asis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosmini binti Dg. Asis berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam perkara Dedy Syam.
 - 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna merah dipergunakan dalam perkara Dedy Syam.
 - 1 (satu) lembar foto copy resi pengiriman barang, dirampas dan dimusnahkan.
- 4) Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

6. **Amar Putusan**

- 1) Menyatakan terdakwa **Rosmini binti Dg. Asis alias Mini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam perkara An. Dedy Syam.
 - 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna merah dipergunakan dalam perkara An. Dedy Syam.
 - 1 (satu) lembar foto copy resi pengiriman barang dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

7. **Komentar Penulis**

Untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya pada Putusan Perkara No.

1673/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim, namun penulis akan mengomentari putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pembedaan atau belum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama atau kepercayaan dan Pekerjaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara

cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan perbuatan yakni menyimpan, menukar, menjual atau menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penggabungan berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, pemisahan penuntutan perkara dikarenakan para tersangka saling menjadi saksi sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka untuk menguatkan dakwaan penuntut umum.

Berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis berkesempatan untuk dapat melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara ini. Penulis sempat mewawancarai hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Bapak Cening Budiana, yang pada saat itu bertindak sebagai

hakim anggota, yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Bapak Cening Budiana, seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Peranan Hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah :

- a. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

- b. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- c. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya;
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan untuk memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu:

a. Saksi Muhardi

- Bahwa benar kejadian pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Kantor saksi PT. Gemilang Mario Jaya bidang Ekspedisi Jalan Kalimantan No. 144 Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi memberi barang berupa 4 karung berisi pakaian seragam sekolah kepada terdakwa Dedy Syam (terdakwa penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal serta jam tersebut diatas
- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari terdakwa yang mengaku pemilik barang dari toko Arief Jaya yang telah menitipkan barangnya di perusahaan ekspedisi PT.Gemilang Mario Jaya berupa 4 karung besar berisi pakaian sekolah yang akan dikirim ke Kendari.

- Bahwa saat itu terdakwa mengaku pengiriman barangnya tidak jadi sehingga terdakwa mengambil barang tersebut kembali.
- Bahwa saksi yakin saat terdakwa telepon dan mengatakan terdakwa pemilik barang tersebut dengan menjelaskan ciri-ciri barang dan tujuan pengiriman.
- Bahwa benar terdakwa datang mengambil barang menggunakan motor roda 3.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Perusahaan Ekspedisi yang saksi kerja merasa rugi sebesar Rp.87.000.000,- karena harus bertanggung jawab dan menggantikan barang yang dibawah oleh terdakwa.

b. Saksi Dedy Syam

- Bahwa benar awalnya saksi yang mengendarai sepeda motor melintas didepan Kantor ekspedisi PT.Gemilang Mario Jaya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 di jalan Kalimantan No. 144 Kota Makassar.
- Bahwa awalnya saksi datang ke perusahaan ekspedisi pura-pura mengirim barang sambil memperhatikan identitas karung yang ada diperusahaan ekspedisi tersebut, kemudian saksi pulang dan menelpon perusahaan ekspedisi PT. Gemilang Mario Jaya dan mengaku dari pihak toko Arif Jaya yang mengatakan membatalkan pengiriman barang berupa 4 karung besar berwarna putih berisi pakaian seragam sekolah yang akan dikirim ke Kota Kendari.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang tersebut dari perusahaan ekspedisi PT. Gemilang Mario Jaya, lalu saksi menyuruh saksi Ardiansyah membawa barang tersebut ke tempat kost saksi di Jalan Abubakar Lambogo dan saksi menyimpan 1 karung, sedangkan 3 karung saksi bawa ke rumah terdakwa Rosmini didaerah sudiang untuk dijual.
- Bahwa saksi menjual seragam sekolah seharga Rp.5000,- per lembar di jalan Abubakar Lambogo dan jalan Vetran Makassar dan saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa hasil perbuatan terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut tanpa seijin pemilik barang yaitu Toko Arif Jaya.

c. Terdakwa Rosmini

- Bahwa benar awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi Dedy Syam untuk menitipkan barang berupa 3 karung pakaian seragam sekolah pada tanggal 29 Agustus 2015.
- Bahwa untuk membayar ongkos angkut barang tersebut yang mana terdakwa menggunakan uangnya untuk membayar lebih dahulu sebesar Rp.200.000,- .
- Bahwa pakaian seragam sekolah tersebut yang mana disuruh oleh Dedy Syam untuk terdakwa menjual seragam tersebut ditempat tinggalnya seharga Rp.5.000,- maupun Rp.10.000,- per lembar.
- Bahwa hasil penjualan seragam tersebut, yang mana terdakwa menyerahkan uangnya kepada Dedy Syam dan sempat terdakwa menukar 1 lembar pakaian dengan 1 liter bensin kepada perempuan bernama Hasma, sehingga akhirnya Hasma membeli pakaian seragam sekolah tersebut seharga Rp.1.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan karena Dedy Syam memberi upah kurang lebih 60 lembar pakaian untuk terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima pakaian muslim dari saksi Dedy Syam namun terdakwa tidak menjualnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan Yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur menyimpan, membeli, menukarkan, menjual atau menarik keuntungan suatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu dipersidangkan Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama terdakwa

Rosmini binti Dg.Asis alias Mini dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim (terdakwa sehat jasmani dan rohani), oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur menyimpan, membeli, menukarkan menjual atau menarik keuntungan suatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 terdakwa menerima barang berupa 3 karung berwarna putih yang berisi pakaian seragam sekolah dari saksi Dedy Syam yang mana barang tersebut dititipkan oleh Dedy Syam kepada terdakwa dan kemudian oleh Dedy Syam menyampaikan

kepada terdakwa agar barang titipan tersebut berupa pakaian seragam sekolah untuk dijualkan lalu terdakwa menawarkan seragam sekolah tersebut di tempat tinggal terdakwa seharga Rp.5.000,- sampai dengan Rp.10.000,- dan terdakwa membujuk perempuan Hasma untuk membelinya seharga Rp.1.000.000,-.

Menimbang, benar terdakwa mendapat keuntungan karena saksi Dedy Syam memberi upah kurang lebih 60 lembar pakaian untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **menyimpan, menukar, menjual atau menarik keuntungan sesuatu benda** telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi yakni saksi korban dari PT.Gemilang Mario jaya dimana terbukti bahwa terdakwa Rosmini binti Dg Asis alias Mini telah menerima 3 karung pakaian dari saksi Dedy Syam dan bertanya “amanji” yang dijawab oleh terdakwa “amanji” dan terdakwa harus mengetahui bahwa pakaian seragam sekolah tersebut bukan miliknya saksi Dedy Syam. Oleh karena itu terdakwa harus melihat bahwa Dedy Syam bukan seorang pedagang pakaian.

Menimbang, atas dasar pertimbangan yang demikian, maka unsur tersebut harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan, dengan demikian unsur ini juga terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawaban kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan Dedy Syam mengakibatkan saksi korban Muhadiri mengalami kerugian.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan

2. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa **Rosmini binti Dg. Asis alias Mini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam perkara An. Dedy Syam.
 - 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna merah dipergunakan dalam perkara Dedy Syam.
 - 1 (satu) lembar foto copy resi pengiriman barang dirampas untuk dimusnahkan.
 - Memberatkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

3. Komentar Penulis

Dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang

memegang peranan penting, hakim dianggap tahu segalanya tentang hukum karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian dan kecermatan hakim dalam menggali informasi yang nyata tentang kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Hakim dituntut harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya dalam memutus suatu perkara.

Pada perkara No. 1673/Pid.B/2015/PN.Mks Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu

Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim yang kemungkinan dianggap ringan oleh masyarakat pada umumnya hakim Cening Budiana dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan:

“Dalam masalah lama pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa kami selalu berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kami menjatuhkan pidana tidak lebih dari tuntutan Jakasa Penuntut Umum, banyak unsur yang dipertimbangkan, seperti hal-hal yang meringkan dan memberatkan terdakwa.”

penjelasan di atas kemudian dikaitkan dengan judul tulisan dan perkara yang penulis bahas. Maka menurut penulis penjatuhan putusan pidana penjara selama 4 (bulan) dalam perkara ini telah sesuai, adapun pidana penjara pada Pasal 480 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim yang kemungkinan dianggap ringan oleh beberapa masyarakat pada umumnya, beberapa dari masyarakat yang penulis wawancarai berpendapat bahwa pemberian sanksi 4 bulan kepada terdakwa tindak pidana penadahan itu termasuk ringan dikarenakan dilihat dari penadahan menjadi salah satu pemicu maraknya tindak pidana pencurian, penipuan dll, dan penjatuhan pidana yang ringan memberi pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat, seperti yang diketahui pemberian efek jera itu dimaksudkan melalui pemberian sanksi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 1673/ Pid.B/ 2015/ PN. Mks, berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya

pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani untuk seluruhnya. Terkait dengan itu, mengingat judul penulis yang menitikberatkan pada tinjauan yuridis maka penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masyarakat juga harus melihat pidana penjara pada Pasal 480 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun. Namun hakim juga harus memperhatikan dasar dan tujuan pemidanaan itu sendiri, agar dengan sanksi pidana tersebut bermanfaat bagi masyarakat, adapun pemberian pidana penjara bagi seseorang berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas.
2. Penyidik harus lebih jeli sehingga tidak terpengaruh dengan pengakuan tersangka yang seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan.
3. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti pembelian.
4. Diharapkan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui bahwa mereka telah melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, termasuk tentang penadahan yang sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui tentang adanya unsur patut mengetahui dalam penadahan baik dilakukan oleh pihak terkait maupun terhadap pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

----- . 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Kartanegara, Satochid. 1954-1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Mahasiswa PTIK Angkatan V.

Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III*. Cintra Aditya Bakti: Bandung.

Marlang, Abdullah. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. A. S Publishing: Makassar.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

----- . 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

Marwan, Mdan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya.

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi.1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung: Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Poerwadarminta.1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisas idan Dekriminalisasi)*.Pustaka pelajar: Jakarta.

Priyanto, Dwidja. 1984. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.PT. Rafika Aditama: Bandung.

Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.Sinar Grafika: Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidanadan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 20 April 2017

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 118 /HKM/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RIRIN VIVI ADRINI A
No.Pokok : B11113558
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : NHP Nusa Harapan Permai) Blok A.3 No. 3 Makassar
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
1673/PID.B/2015/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017, dan telah dibimbing oleh :

1. CENING BUDIANA, SH.,MH.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 03 April 2017 Nomor : 3763/UN4.5.3/ PL.02/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA

BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007